

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal (Signaling Theory)

Teori Sinyal adalah teori yang menjelaskan mengenai cara pemberian sinyal perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut yang akan digunakan (Jama'an, 2008). Teori signal mengemukakan bahwa teori ini berkaitan dengan informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan. Keinginan yang mendorong timbulnya signal dengan pihak luar, dimana informasi yang diberikan pada investor relatif lebih sedikit dan lebih lambat. Informasi yang dibutuhkan disajikan pada laporan keuangan yang dibuat perusahaan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini teori signal menjelaskan bahwa pihak pemerintah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat memberikan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal, dan pengungkapan laporan keuangan yang lebih lengkap dan dapat diandalkan yang mampu dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak pemberi amanah. Sinyal yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan dan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh manajemen dalam merealisasikan harapan dan keputusan para pemegang saham. Informasi yang diberikan oleh perusahaan umumnya merupakan catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, saat ini, maupun keadaan di masa yang akan datang.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggungjawab atas urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dasar 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah

otonom, yang meliputi : Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fungsi Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah, Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota). DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah dari rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepala Daerah. DPRD dan kepala Daerah mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan atas Perda, Anggaran, dan pengawasan. Kepala Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan atas Perda, dan kebijakan daerah. DPRD dan kepala Daerah dalam mengurus dan mengatur tata

kelola urusan pemerintahan melimpahkan seluruh dari bagian kekuasaan oleh pejabat Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana keuangan tahunan Daerah yang sudah ditetapkan dengan Perda. Semua penerimaan Daerah ialah

1. Pendapatan Daerah,
2. Penerimaan Pembiayaan daerah.

Pengeluaran Daerah meliputi :

1. Belanja Daerah dan,
2. Pengeluaran pembiayaan daerah.

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu perusahaan yang dijadikan sebagai tolak ukur seorang investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal. Selain dijadikan sebagai alat informasi keuangan suatu perusahaan, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan dan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan secara sederhana adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Menurut Bastian (2006:96) pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan saat ini atau periode kedepannya dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sektor publik.

Setiap entitas salah satunya pemerintah daerah, diwajibkan untuk menyusun suatu laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilampirkan dengan LKPD. Pada Undang-Undang pasal 32 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah. Pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. (Farid dan Siswanto, 2011:2) menyatakan bahwa Laporan keuangan diharapkan mampu memberikan informasi yang diharapkan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 setiap masing-masing entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk selalu melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan yang merupakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan Bersama. Tujuan Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Laporan keuangan diharapkan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Laporan keuangan memberikan bantuan bagi para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Laporan keuangan dapat membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah digunakan untuk mencapai kinerja yang sudah direncanakan.

Sebuah laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila informasi-informasi yang terkandung didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dengan pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai. serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Hakim, 2017). Kualitas laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai suatu penilaian terhadap kinerja pusat pertanggungjawaban atas suatu peristiwa, baik itu dilihat dari segi yang berwujud ataupun dari segi yang tidak berwujud. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Relevan

Laporan Keuangan sebagai informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Unsur-unsur yang mencangkup dalam informasi yang relevan ialah sebagai berikut :

a. Manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan para pengguna mengoreksi ekspekstasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif, informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencangkup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambila keputusan.

2) Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau sesuai dengan peristiwa yang

disajikan yang sebenarnya terjadi tidak mengandung nilai yang mencurigakan. Laporan keuangan yang andal berarti terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dan siverifikasi.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal apabila entitas menerapkan akuntansi yang sama. Oleh karea itu, entitas pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun apabila terjadi perubahan maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode yang terjadi perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi para berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya. Alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat di era reformasi, pemerintah dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat dan kompleks dalam tugas pekerjaannya. Fenomena yang masih terjadi pada era sekarang ini ialah masih adanya permasalahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan fenomena tersebut dalam penganggaran yang baik, sistem pencatatan pertanggungjawaban keuangan negara yang akurat, presiden dan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan lebih baik. Hal tersebut harus berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian atas pelaksanaannya. Demi mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dengan memunculkan keyakinan terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota kepada masyarakat di butuhkan sistem pengendalian internal pemerintah yang

harus berintegrasi dengan proses kegiatan sehari-hari dengan melibatkan unsur pemimpin dan seluruh pejabat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern telah dikembangkan dengan fungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, yaitu PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengendalian Intern yaitu mencakup perencanaan organisasi, semua metode yang dikoordinasikan serta ukuran yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam rangka melindungi harta, memeriksa keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong ditaatinya kebijakan pengelolaan yang ditetapkan oleh manajemen (McKesson & Robbins 1949). Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa pengendalian intern mencakup pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi yang dapat diartikan bahwa tidak hanya mengedepankan *hard control*, tapi juga menekankan nilai etika-integritas-kompetensi-filosofi pimpinan yang merupakan *soft control*. *The committee on sponsoring the treadway committee (COSO)* mendefinisikan bahwa pengendalian sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil

lain dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal pemerintah dapat dikatakan sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus agar dapat semakin menyempurnakan pencapaian tujuan suatu pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Demi kelancaran kegiatan pengendalian intern harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara administrasi maupun secara fisik yang akan digunakan mendukung kegiatan pengendalian intern yang lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan pelaporan keuangan yang semakin andal. Selain itu SPIP juga harus ditunjang dengan prosedur pengamanan, ditaatinya peraturan yang berlaku, dan semakin meningkatnya integritas aparatur pemerintah.

Menurut Suwanda D & Dailibas (2013) SPIP terdiri atas lima unsur , yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemeimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian

yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Dengan ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Adanya kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah pusat.

2. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengertian risiko sendiri ialah kemungkinan yang belum terjadi atau mungkin dapat terjadi. Jika telah terjadi berarti belum bisa disebut dengan risiko, melainkan masalah. Agar tidak terjadi masalah maka perlu dikelola melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pemimpin instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dianggap gagal jika ternyata risiko benar-benar menjadi masalah. Masalah tersebut menyebutkan tidak tercapainya tujuan organisasi.

2. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mungkin, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

3. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dilaksanakan dengan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, rekonsiliasi, evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri, pengujian efektivitas sistem pengendalian intern, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit review lainnya.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berpengaruh pada penyajian informasi keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Suatu entitas dikatakan berhasil bukan hanya berpengaruh pada sumber daya manusia yang dimiliki, namun kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki juga berpengaruh penting. Dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dipastikan bahwa dilakukan sebaik mungkin agar dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hadari Nawari, H (2003:42) , pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses pemanfaatan manusia dalam pekerjaan sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi yang dimilikinya dapat berfungsi bagi tercapainya tujuan perusahaan.

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kompetensi merupakan hasrat dasar dari diri seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. Sumber daya manusia tanpa adanya kompetensi dalam diri seseorang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif, yang artinya pekerjaan yang dikerjakan tidak akan selesai tepat waktu atau pekerjaan dilakukan dengan menyia-nyiaakan waktu yang telah ada (Desiana Wati, Kadek, dkk 2014).

Dalam suatu perusahaan kompetensi sangat penting untuk menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu, yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan, maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. Dengan adanya

kompetensi perusahaan dapat mengetahui bagaimana seorang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan perusahaan, mengendalikan diri saat menghadapi masalah/tekanan.

2.1.6 Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi pada masa sekarang ini sangat berkembang dengan pesat. Banyak kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dimudahkan adanya teknologi dengan aplikasi dalam *smartphone*. Dalam dunia *budgeting* saat ini sangat banyak menggunakan teknologi, dan untuk kehidupan pada era sekarang ini pun dalam dunia pelaporan keuangan tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi. Banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan untuk membantu para penyusun laporan keuangan baik itu dalam sektor publik maupun sektor swasta. Dengan begitu perkembangan teknologi dalam dunia pelaporan keuangan sangat memberikan kemudahan bagi para penyusun laporan ataupun bagi para pengguna laporan tersebut.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menyajikan sebuah laporan keuangan pemerintah. Informasi-informasi yang tercantum dalam pelaporan tersebut harus sesuai dengan kondisi keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat periode tahun laporan tersebut. Informasi bagi para pemakai adalah informasi yang mengandung unsur nilai atau kualitas (Suwardjono, 2005;165). Oleh karena itu, informasi yang disajikan akan menuai kebermanfaatan bagi para pengguna untuk kepentingan urusan masing-masing.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan untuk digunakan sesuai kebutuhan berbagai pihak. Dimaksud dengan peningkatan laporan keuangan untuk dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai dan lengkap serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Ikhwanul, 2008).

Menurut (Jogiyanto dan Abdilla, 2010 dalam Febianti 2018), Teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Pengadaan informasi membutuhkan investasi yang besar. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup dengan menggunakan aturan (*manage*) oleh bagian Teknologi Informasi, namun harus dengan dikelola (*govern*) secara professional. Pengelolaan Teknologi informasi yang professional disebut sebagai tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*).

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan penggunaan secara optimal dengan menggunakan komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan sejenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wukinson et al., 2000 dalam Rahman 2015). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud ialah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah penggunaan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan membantu mempercepat kegiatan pencatatan, penyajian, menganalisa laporan keuangan pemerintah daerah karena computer mempunyai aplikasi akuntansi yang

diciptakan untuk mengamati transaksi-transaksi akuntansi ke dalam laporan dan untuk pengambilan keputusan yang sehubungan dengan keadaan keuangan dalam satu periode pelaporan (Rasyida Nadir dan Hasyim, 2017)

2.1.7 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Pada pemerintah pusat/daerah dalam mengelola keuangan Negara atau Daerah dibutuhkan pengelolaan yang tepat dan akurat, dengan memerlukan sistem akuntansi untuk mendukung proses penyusunan laporan yang mengelola pengolahan dana serta perputaran keuangan Negara/Daerah secara besar. Menurut menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada 3 ayat (11) Definisi Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian sistematis prosedur, mulai dari penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mendukung mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah : Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Dari pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang merupakan serangkaian prosedur untuk mengelola semua transaksi, aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah guna menghasilkan informasi akuntansi dengan tepat waktu dan mutu yang dapat diandalkan baik

digunakan oleh para pengguna badan eksekutif maupun manajemen pada pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah disajikan dengan relevan dan akurat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan Opini Wajar Tanpa pengecualian apabila laporan keuangan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BPK. Dengan penilaian dari BPK dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) cukup membuktikan bahwa laporan keuangan suatu pemerintah daerah terbukti tidak terdapat kecurangan baik internal maupun eksternal. Dengan hal tersebut laporan keuangan dinyatakan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi keadaan suatu entitas dalam periode pelaporan.

Menurut Halim, Abdul (2004:28) Tujuan sistem akuntansi pemerintah adalah :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)
2. Manajerial
3. Pengawasan

Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap dan lebih cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah.

2. Manajerial

Manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Pengawasan berarti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Setiap entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebaiknya sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dalam *international financial reporting standar* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Latridis, 2010 dalam Yulia 2018). Sama halnya dengan pemerintah pusat/daerah, pemerintah juga harus menyusun laporan keuangan yang mengacu pada standar yang berlaku dalam pemerintahan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Nugraheni dan Subach, 2008 dalam Yulia 2018). Baik buruknya laporan keuangan dapat dilihat dengan sistem akuntansi keuangan daerah. dengan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta dapat memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang dan ekuitas dana (kurnia, 2013). Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah pusat/daerah harus sesuai dengan IFRS dan standar yang berlaku dalam pemerintahan dengan sistem akuntansi

keuangan daerah laporan keuangan menyediakan informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terkait dengan Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah sebelumnya telah dilakukan oleh Nurillah (2014), Abdul Hakim (2017), Ningrum (2018), Yensi (2014), Darmawan (2018). Lisda dkk (2018), Pujanira (2017) dan Modo (2016)

Adapun penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurilla (2014) dan Darmawan (2018) mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal mengatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh, Ruslina (2018) dan Hakim (2017) mengatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengatakan bahwa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) mengenai Penerpan Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak sejalan dengan pendapat dari Ningrum (2018) yang mengatakan bahawa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap nilai iformasi pada kualitas laporan keuangan. Penelitan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) yang dilakukan oleh Yensi (2014) mengatakan bahwa berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. dan penelitian yang dilakukan oleh Modo (2016) mengenai Penerapan Teknologi Informasi mengatakan bahwa berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut secara singkat ringkasan dari peneliti terdahulu, dapat dilihat pada tabel

2.1 :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Sintike Mentari Modo, David Paul Elia Saerang, Agus Tony Poputra	2016	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pengawasan Internal, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi berpengaruh positif . Pemahaman tentang Peraturan, Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Abdul Hakim	2017	”Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan	Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

			keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu”	
3.	Putriasri Pujanira	2017	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah provinsi DIY	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY.
4.	Khoirina Kencana Ningrum	2018	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas	Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap nilai informasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap nilai informasi

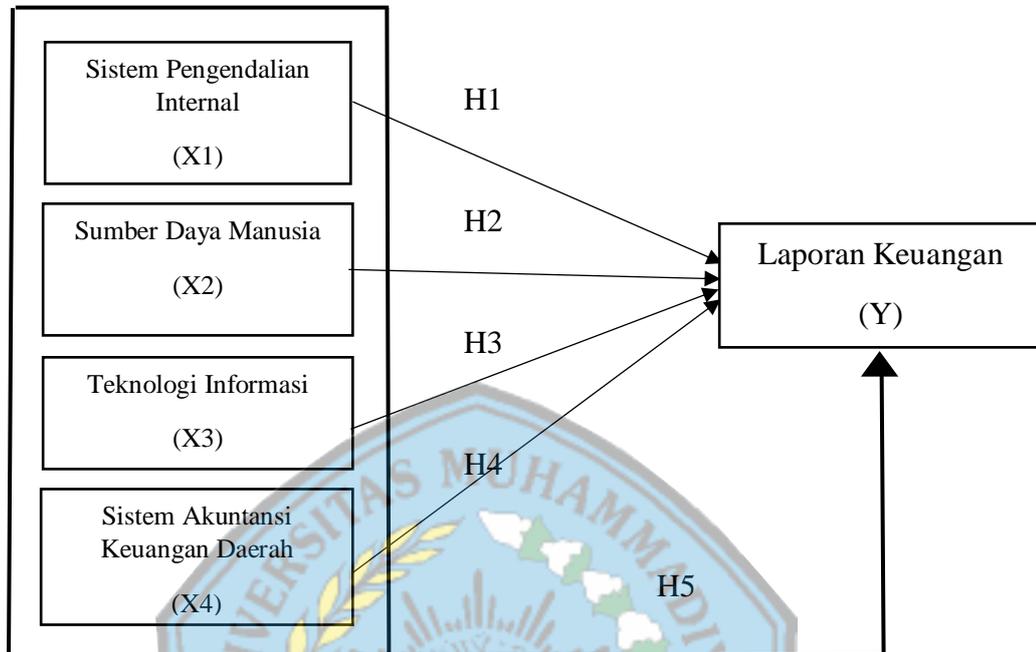
			laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kebumen”	laporan keuangan pemerintah daerah
5.	Ayang Darmawan	2018	”Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA provinsi Aceh”	Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Ruslina Lisda, Liza Laila Nurwulan, Rahmi Syifa Alifa	2018	Pengaruh Penerapan SAKD, Kapasitas SDM Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD	penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Salah satunya pelayanan informasi mengenai kondisi laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan gambaran tentang kondisi keadaan keuangan entitas dan kinerja dengan situasi pada masa lalu, masa sekarang ataupun sebagai bahan untuk perencanaan diwaktu yang akan datang. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi dalam suatu entitas pada periode pelaporan. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terlebih kepada para investor yang ingin investasi dapat melihat laporan keuangan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara variable terkait yaitu kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan variable bebas sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban praduga sementara atas sesuatu masalah mengenai hubungan variable-variabel yang masih diuji kebenarannya. Pada kerangka pemikiran diatas dibutuhkan penelitian untuk mengetahui kebenaran antara hubungan variable-variabel yang sedang di uji.

2.4.1 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem merupakan faktor yang mutlak sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Sistem yang sudah dilaksanakan dengan baik harus selalu dikontrol agar tetap berjalan dengan baik guna meminimalisir masalah yang memungkinkan timbul. Pengendalian Internal merupakan salah satu faktor yang sangat kuat dalam membangun *good governance*. Sistem pengendalian internal

bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menjalin keandalan dalam sebuah laporan keuangan dan data-data keuangan suatu perusahaan dengan memfasilitas efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah dan menjaga asset negara (Desiana dan Budi, 2014). Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian intern yang tidak maksimal sehingga mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang handal dan relevan dalam mengambil keputusan (Mardiasmo, 2004 dalam Desiana dan Budi, 2014).

Permasalahan yang banyak terjadi atas laporan keuangan lebih kepada sistem pengendalian intern dan kemampuan SDM (Kotot Gutomo, Auditor Madya Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah/ bpkp.go.id). Dengan lebih memperhatikan sistem pengendalian intern akan meminimalisir masalah mengenai kepatuhan terhadap peraturan dalam penyusunan suatu laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan begitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih menghasilkan secara optimal dalam memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Hasil penelitian dari Darmawan (2017) dan Nurillah (2014) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh Positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

2.4.2 Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan sangat terpengaruhi apabila terjadi permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Menurut Bryd (2011:5) Sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang paling berharga dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karyawan akan menjadi baik apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, dan akan menimbulkan permasalahan apabila dikelola dengan tidak benar.

SDM merupakan human capital di dalam suatu organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan secara profesional dan *economic rent*. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Nurillah, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yensi (2014) dan Pujanira (2017) mengatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dalam dunia pemerintahan harus diduduki oleh orang yang tepat, yaitu dengan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan pada peraturan yang ada. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

2.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat maka kebutuhan akan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan semakin meningkat. Didukung dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju dari berbagai bidang. Teknologi yaitu sistem yang mendukung segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan alat dan akal (*Hardware* dan *Software*) yang seolah-olah membuat lebih mudah dan praktis. Informasi adalah hasil pemrosesan melalui pengorganisasian dengan penataan data yang mempunyai nilai pengetahuan untuk digunakan oleh penggunanya (Sutabri 2014:2).

Teknologi informasi pada dasarnya sangat membantu pemerintah ataupun perusahaan dalam menghasilkan suatu informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah sangat di manfaatkan oleh penggunanya. Informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan untuk tindakan yang akan diputuskan. Dengan begitu informasi yang bermanfaat merupakan informasi yang didalamnya sudah sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan kemudian informasi tersebut mudah dipahami dan dimengerti.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) dan Modo (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Teknologi Informasi (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

2.4.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran dan pengklasifikasian segala kegiatan transaksi dan kejadian. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip dalam akuntansi yang telah diterapkan dalam penyusunan atau menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP yang berbasis akrual ialah yang mengakui segala pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran dengan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Gede (2000:95) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ialah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi-transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan sebuah informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan baik bagi para pengguna diluar eksekutif maupun pada berbagai tingkatan manajemen pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dengan sesuai (SAP). Pemerintah setiap daerah

mempunyai kebijakan masing-masing dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah untuk itu pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang berisi sistem dan prosedur untuk menyajikan laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dan Hakim (2017) menyatakan bahwa penerapan SAK berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) berpengaruh positif terhadap laporan keuangan (Y)

2.4.5 Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya

Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hipotesis-hipotesis yang telah dijabarkan diatas, secara parsial masing-masing variable berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suatu perusahaan membutuhkan laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan yang artinya laporan keuangan berperan sangat penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Dengan menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas tentunya dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana kinerja dari perusahaan. Menciptakan sebuah laporan keuangan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, juga

dipengaruhi oleh pemanfaatan dari teknologi informasi yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan, serta dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dimana sebuah laporan keuangan format yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian dilakukan oleh Darmawan (2018) bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Sistem Pengendalian Intern, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X5) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y)